

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah membuktikan bahwa UMKM merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, terutama dalam masa-masa krisis. Ketika krisis ekonomi 1998 melanda dan banyak perusahaan besar tumbang, UMKM justru mampu bertahan dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak. Begitu pula saat guncangan ekonomi global tahun 2008, UMKM kembali menjadi penyelamat. Fleksibilitas, jangkauan lokal, dan ketergantungan rendah pada pasar internasional membuat UMKM tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Menurut data Kementerian UMKM per Desember 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia atau setara dengan 99,9% dari total usaha yang ada. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atau 0,01%. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp9.300 triliun. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas mencapai 15%, yang sebagian besar berasal dari sektor makanan, kerajinan tangan, dan produk tekstil. Sektor UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Awalnya kategori usaha mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh UU No.20 Tahun 2008 yang skalanya ditentukan oleh aset dan omset. Namun dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan kondisi perekonomian, kategori skala UMKM mengalami perubahan karena adanya ketentuan baru Peraturan Presiden No.7 Tahun 2021. Perubahan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Kategori Skala UMKM

Kriteria	UU No.20/2008			PP No.7/2021		
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Omset	s.d Rp300 juta	Rp 300-500 juta	Rp 2,5-50 Miliar	s.d.Rp 2 Miliar	Rp 2-15 Miliar	Rp 15-50 Miliar
Asset	s.d. 50 juta	Rp 50-500 juta	Rp 500 juta-1 Miliar	-	-	-
Modal Pendirian	-	-	-	s.d.Rp 1 Miliar	Rp 1-5 Miliar	Rp 5-10 Miliar

Dalam perkembangannya, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan optimalisasi peranan UMKM melalui berbagai program diantaranya perlindungan hukum dan kemudahan akses perizinan melalui OSS, fasilitas HAKI, dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SPSE). Selain itu adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM, program kemudahan akses pembiayaan modal usaha dan hibah seperti KUR, LPDB UMKM, dan pembiayaan ekspor, serta infrastruktur dan pendukung fasilitas lainnya seperti kolaborasi dan kemitraan dengan Lembaga lainnya. Walaupun Upaya pemerintah sudah sangat optimal, namun kenyataan menunjukan bahwa Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya

secara maksimal, dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih memiliki hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal terutama dalam membuat laporan keuangan. Banyak para pelaku mengelola usahanya dengan dasar kemampuan yang kurang memadai terutama aspek pengelolaan keuangan tanpa memiliki dasar pengetahuan maupun keterampilan mengenai manajemen usaha dan manajemen keuangan yang baik.

Aspek-aspek manajemen usaha yang meliputi perencanaan usaha, pengorganisasian, implementasi dan pengendalian usaha menjadi sesuatu yang jarang diperhatikan. Padahal itu merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan usaha karena kelanjutan usaha dinilai dari tolak ukur kinerja keuangannya. Sebagian besar pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak mengetahui laba yang didapatkan, mereka menjawab bukan dengan nominal angka rupiah melainkan dengan benda-benda berwujud seperti peralatan untuk usaha, motor, mobil dan rumah. Jawaban tersebut tidak menggambarkan laba yang sebenarnya didapat oleh Perusahaan karena itu merupakan salah satu penggunaan dana yang mungkin didanai dari laba atau dari utang ataupun dari modal pemilik. Untuk mengelola keuangan dengan baik adalah dengan cara menerapkan akuntansi dengan baik. Dengan akuntansi yang memadai dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan dan menghitung pajak. (Warsono,2010).

Melihat pentingnya penerapan akuntansi bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah, IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui dewan standar Akuntansi (DSAK) menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2009, DSAK telah mengesahkan SAK ETAP (Entitas tanpa Akuntabilitas Publik) dan standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan Standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki

akuntabilitas kepada publik, standar ini masih dirasa sulit untuk diterapkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga IAI menyiapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM menyederhanakan elemen laporan keuangan menjadi 3 bagian, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Basis pengukuran transaksi pun hanya mengacu pada nilai perolehan atau historis, tidak berbasis nilai wajar seperti pada standar akuntansi untuk komersial pada PSAK 1. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi UMK untuk lebih giat dalam Menyusun laporan keuangan. Kemudian menjadi berkembang dengan adanya skill dalam penyusunan laporan keuangan.

Badan Pusat Statistik merilis data terkait perkembangan jumlah industri mikro dan kecil pada tahun 2023, bahwa Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-12 (Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit)). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM terkait jumlah industri mikro, kecil dan menengah pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat menduduki posisi ke-8 dengan jumlah 593.100 UMKM. Keseluruhan UMKM ini terdiri dari usaha mikro sebanyak 553.000 UMKM, usaha kecil sebanyak 38.000 UMKM dan usaha menengah sebanyak 3.000 UMKM, sebagaimana informasi yang didapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Sumatera Barat adalah pelaku UMKM dengan berbagai sektor usaha diantaranya sektor makanan dan minuman, kerajinan, fashion dan lainnya.

Namun UMKM yang paling terkenal dan mendominasi di Sumatera Barat adalah di sektor makanan yaitu Rendang.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Provinsi (Unit)

NO.	PROVINSI	MIKRO	KECIL	TOTAL
1	JAWA TIMUR	862.057	115.414	977.471
2	JAWA TENGAH	811.039	51.887	862.926
3	JAWA BARAT	584.903	56.736	641.639
4	NUSA TENGGARA BARAT	131.958	18.004	149.962
5	DI YOGYAKARTA	129.289	4.736	134.025
6	SUMATERA UTARA	119.539	7.368	126.907
7	NUSA TENGGARA TIMUR	124.566	1.374	125.940
8	BALI	120.752	5.035	125.787
9	SULAWESI SELATAN	119.613	4.313	123.926
10	ACEH	106.527	3.999	110.526
11	BANTEN	90.908	6.184	97.092
12	SUMATERA BARAT	84.077	4.144	88.221

Sumber : BPS (2023)

Produk Rendang sudah sangat mendunia, sehingga permintaan akan produk rendang juga semakin meningkat. Daerah penghasil rendang paling terkenal di Sumatera Barat adalah Kota Payakumbuh. Pada tahun 2019, Kementerian Perindustrian membangun Sentra Rendang di Wilayah Payakumbuh untuk memfasilitasi para UMKM rendang memproduksi dengan peralatan modern dan telah memiliki izin edar berstandar internasional. Sehingga para pengusaha rendang di Payakumbuh bisa mengirimnya keseluruh manca negara. Berdasarkan data Dari Dinas Koperasi dan UKM Perindag dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, jumlah UMKM makanan rendang sebanyak 51 UMKM. Kebanyakan dari UMKM yang memproduksi rendang ini sudah melakukan ekspor dan dengan omset penjualan

sebesar Rp 200 juta – 300 juta per tahun. Dengan omset yang lumayan tinggi tentunya perlu pencatatan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM yang bertujuan untuk mengurangi resiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan - keputusan ekonomi. Selain itu sangat diperlukan dalam merumuskan berbagai keputusan dan memecahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan diterapkannya akuntansi dalam bentuk laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh informasi tentang kinerja, aliran kas dan informasi yang lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasari dengan kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk penelitian yang **berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada UMKM Rendang Unikayo Kota Payakumbuh Dengan Pendekatan SAK EMKM”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pada laporan keuangan UMKM Rendang Unikayo selama ini?
2. Apasaja kendala yang dihadapi oleh UMKM Rendang Unikayo dalam menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangan?
3. Apa manfaat yang dirasakan oleh UMKM Rendang Unikayo jika menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pada laporan keuangan UMKM Rendang di Kota Payakumbuh selama ini.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh UMKM Rendang dalam penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh UMKM Rendang jika pelaporan keuangan dibuat berdasarkan SAK EMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan untuk entitas skala kecil.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi, khususnya dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada sektor UMKM, yang selama ini masih relatif terbatas penelitiannya di Indonesia.
2. Menjadi referensi akademik dalam memahami tantangan dan dinamika penerapan standar akuntansi di sektor informal dan semi-formal, yang cenderung memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari aspek pengetahuan, teknis, maupun akses terhadap informasi keuangan.
3. Menguatkan dasar teoritis mengenai relevansi dan kepraktisan SAK EMKM, khususnya dalam membantu entitas kecil menyusun laporan keuangan sederhana yang tetapandal, relevan, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

4. Mendorong penelitian lanjutan dalam bidang akuntansi UMKM, baik dari perspektif penerapan standar, efektivitas pelatihan akuntansi, maupun integrasi teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi :

1. Pelaku UMKM Rendang di Kota Payakumbuh, agar lebih memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, dan akses terhadap pembiayaan eksternal.
2. Pemerintah daerah dan instansi pembina UMKM, sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam Menyusun strategi pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan akuntansi kepada pelaku UMKM, khususnya di sektor pangan olahan tradisional.
3. Akuntan publik dan akademisi, sebagai bahan rujukan dalam menyesuaikan pendekatan edukatif dan konsultatif kepada UMKM, serta sebagai dasar penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan standar akuntansi di sektor informal dan semi-formal.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama, dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), ruang lingkup penelitian, dan

sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai topik yang diteliti serta alasan pentingnya penelitian dilakukan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti konsep dasar akuntansi UMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), serta studi terdahulu yang mendukung. Selain itu, dalam bab ini disusun kerangka pemikiran dan hipotesis (jika penelitian bersifat kuantitatif) atau asumsi dasar penelitian (jika bersifat kualitatif).

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian (seperti pedoman wawancara/kuesioner), serta metode analisis data yang digunakan. Bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan secara ilmiah.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta analisis terhadap temuan tersebut. Pembahasan dikaitkan dengan teori dan standar akuntansi yang relevan (khususnya SAK EMKM), untuk melihat kesesuaian antara praktik UMKM dan ketentuan yang berlaku.

5. BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran bagi pihak terkait (UMKM, pemerintah, akademisi), serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.